

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urban farming merupakan suatu gerakan yang dimulai di Amerika Serikat sebagai upaya terhadap buruknya situasi dan kondisi ekonomi beberapa negara pada saat perang dunia terutama tingginya harga sayuran pada kala itu. Sekitar 20 juta victory garden dibuat selama perang dunia kedua. Victory garden berupa kegiatan membangun taman di sela-sela ruang yang tersisa. Hasil dari program tersebut membuat pemerintah Amerika Serikat mampu menyediakan 40% kebutuhan pangan warganya pada waktu itu (Simanjutak, 2012). Berbeda dengan Amerika Serikat, gerakan urban farming di Indonesia muncul akibat kesadaran masyarakat akan kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan banyaknya ruang atau lahan terlantar yang tidak dimanfaatkan.

Pengolahan pemanfaatan lahan minimalis menjadi lahan produktif dapat mendukung terealisasinya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Yusro, 2014). Salah satu upaya tersebut dengan mengadakan urban farming. Urban farming (pertanian perkotaan) merupakan sebuah upaya pemanfaatan ruang minimalis yang terdapat di perkotaan untuk dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produksi yang mana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Saat ini paradigma fungsi ruang terbuka hijau (RTH) pada ruang kota diseluruh dunia mulai bergeser menuju fungsi ruang terbuka hijau produktif yang tidak lagi hanya mengandalkan fungsi ekologis dan estetika saja. Ruang terbuka hijau kini banyak difungsikan sebagai kegiatan urban farming yang menguntungkan secara ekonomi dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat kota.

Berdasarkan penelitian Belinda & Rahmawati, (2017) penduduk miskin kota di negara-negara berkembang harus menyisihkan sekitar 30 – 60% dari total pendapatannya untuk pembelian bahan makanan. Ini berarti bahwa penduduk miskin kota mengeluarkan 10 – 30% bahan pangan lebih mahal dari penduduk miskin desa. Kondisi ini mendorong pemerintah maupun masyarakat untuk di kawasan perkotaan harus mulai mencoba untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (Abrilianty, 2013). Kurangnya ketersediaan pangan juga disebabkan makin berkurangnya lahan pertanian di perkotaan. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi. Pada prakteknya selain sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam, perkotaan juga menyita lahan terbuka akibatnya kualitas lingkungan perkotaan menurun dan ketersediaan lahan hijau semakin minim terutama lahan pertanian. Adapun perubahan proporsi urban rural di Jawa, fakta menunjukkan 20 tahun yang lalu 70% terdiri atas pedesaan dan 30% kota, akan tetapi kondisinya sekarang 60% kota dan 40% pedesaan, percepatan pertumbuhan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian mengancam ketahanan pangan dan memperbesar peluang terjadinya kasus gizi buruk (Belinda & Rahmawati, 2017).

Di Kota Surabaya, pertanian kota sudah dilakukan oleh masyarakat secara marginal. Akan tetapi, peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi kota Surabaya relatif kecil dan cenderung menurun setiap tahunnya. Terhitung mulai tahun 2007 mencapai 0,11 %, tahun 2008 mencapai 0,10 %, tahun 2009 mencapai 0,10 %, tahun 2010 mencapai 0,09 %, dan pada tahun 2011 mencapai 0,08 %. Penurunan ini bisa dimaklumi karena kota Surabaya lebih dikenal sebagai kota

perdagangan dan jasa (BPS, 2011). Sebagai kota perdagangan dan jasa, kontribusi sektor pertanian di Kota Surabaya relatif kecil. Hal ini terlihat dalam lima tahun terakhir luas lahan pertanian yang diusahakan di Surabaya selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2013, luas lahan pertanian di Surabaya mencapai 235 Ha, kemudian pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan menjadi 158 Ha dan 167 Ha. Pada tahun 2016 dan 2017, luas lahan pertanian di Surabaya terus mengalami penurunan masing-masing menjadi 35 Ha dan 32 Ha (DKPP Surabaya, 2017). Tentu saja hal ini mengakibatkan persediaan bahan pangan menjadi menurun. Penurunan prosentase yang signifikan ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk di Surabaya yang meningkat setiap tahunnya. Saat ini jumlah penduduk di Surabaya tercatat sebanyak 2.970.730 jiwa. Jumlah penduduk semakin meningkat sedangkan persediaan bahan pangan menurun. Kurangnya kebutuhan pangan ini sebagian besar dialami oleh masyarakat yang tidak memiliki penghasilan cukup sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka untuk meningkatkan pengembangan hutan kota melindungi lahan pertanian, serta untuk menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan beberapa kebijakan terkait permasalahan tersebut. Seperti yang tercantum dalam acuan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Surabaya tahun 2016 – 2021, salah satu program kerja yang disusun oleh Dinas Pertanian kota Surabaya bidang Pertanian dan Kehutanan yaitu program *Urban Farming*.

Program *Urban Farming* merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi target ideal dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan serta untuk memenuhi kebutuhan mereka dibidang pangan.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta memotivasi keluarga miskin untuk membentuk suatu kelompok pertanian guna untuk membangun dirinya sendiri agar lebih mandiri dan maju di Kota Surabaya.

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti melakukan survei pendahuluan kepada KRPL SERPIS, Kecamatan Wonocolo pada bulan Juni 2021. Peneliti mendapatkan informasi dari Ibu Yuni selaku petani setempat sekaligus ketua KRPL SERPIS. Kelompok tani wanita KRPL Serpis merupakan satu – satunya kelompok tani yang aktif berdiri sejak tahun 2016 hingga saat ini di daerah Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. KRPL Serpis mempunyai anggota berjumlah 30 orang.

Awal mula terbentuknya KRPL SERPIS ini yaitu dari adanya kegiatan Pemerintah Kota Surabaya yang mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kelestarian serta meningkatkan ruang terbuka hijau, salah satunya dengan cara mengadakan lomba *Green and Clean* pada tahun 2015. Pemerintah Kota Surabaya memilih juara dengan kriteria lingkungan yang dinilai adalah kebersihan, penghijauan, dan pengelolaan limbah. Dan pada saat itu Kelompok tani wanita Serpis dari Kecamatan Wonocolo yang masuk dalam kategori pengelolaan lingkungan terbaik Kota Surabaya. Hingga pada akhirnya Pemerintah terus membimbing kelompok tani wanita Serpis tersebut sampai menjadi KRPL (Kelompok Rumah Pangan Lestari). KRPL Serpis (Kelompok Rumah Pangan Lestari) sendiri yaitu suatu bentuk kegiatan *urban farming* yang dibentuk dan dikelola oleh warga RT. 04 RW. 04, Kecamatan Wonocolo dengan tujuan untuk mengembangkan beraneka macam komoditas pertanian yang lestari dan berkelanjutan.

Menurut Bu Yuni selaku ketua KRPL Serpis, para pengurus selalu mengadakan kegiatan rapat rutin bersama anggota tiap bulan. Hal ini dilakukan karena masih banyak anggota yang belum melaksanakan tugas sesuai dengan program yang berjalan. Dalam kegiatan pelaksanaan program urban farming, KRPL Serpis juga mendapat bantuan serta penyuluhan dari instansi terkait seperti DKPP Surabaya dan Dinas Pertanian. Akan tetapi kegiatan penyuluhan tersebut dalam realitanya masih belum bisa diterapkan secara maksimal karena pelaksanaan program *urban farming* di KRPL Serpis sendiri juga membutuhkan bantuan partisipasi dari anggota serta bimbingan dari penyuluh pertanian. Sedangkan penyuluh pertanian sangat jarang datang ke lokasi KRPL Serpis untuk memberikan arahan sehingga kegiatan program urban farming yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan maksimal atau bahkan tidak terlaksana.

Ibu Yuni selaku ketua KRPL SERPIS, mengatakan bahwa hal – hal seperti biaya serta waktu yang diluangkan oleh anggota sangat berdampak pada keberlanjutan program *urban farming*. Sedangkan pada saat ini kondisi ekonomi setiap anggota tidak dapat dipastikan mengingat adanya dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaan program urban farming tidak maksimal dan tentunya menjadi kendala dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan program *urban farming* di KRPL Serpis.

Selama ini kajian mengenai implementasi urban farming hanya dilakukan dengan metode penelitian deskriptif, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat apakah teori yang digunakan pada kajian penelitian sebelumnya sesuai atau tidak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan *urban farming*. Untuk

mengetahui pelaksanaan *urban farming* di Kota Surabaya, peneliti memilih KRPL SERPIS sebagai tempat untuk melakukan penelitian karena dianggap dapat merepresentasikan contoh *urban farming* di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja kegiatan program *urban farming* yang ada KRPL SERPIS Surabaya ?
2. Apakah variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sikap para pelaksana, dan komunikasi organisasi yang diterapkan di KRPL SERPIS Surabaya sudah baik ?
3. Apakah variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sikap para pelaksana, dan komunikasi organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan program *urban farming* di KRPL SERPIS Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan seperti diatas, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kegiatan program *urban farming* di KRPL SERPIS Surabaya.
2. Mendeskripsikan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sikap para pelaksana, dan komunikasi organisasi di KRPL SERPIS Surabaya.
3. Menganalisis variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sikap para

pelaksana, dan komunikasi organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan program *urban farming* di KRPL SERPIS Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membutuhkan informasi berkaitan dengan *urban farming*, yaitu :

1. Bagi masyarakat khususnya kelompok tani yang ada di daerah perkotaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan dalam hal implementasi program *urban farming* untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk membuat keputusan atau kebijakan dimasa yang akan datang dalam hal perencanaan program – program *urban farming*.
3. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut mengenai *urban farming* (pertanian perkotaan).